



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMAD MASROFI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **184595**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.785.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/36 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m²/40 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m²/48 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m²/145 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/48 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m²/440 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.095.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88 (JARI JARI) Tahun 2016, HADIAH Rp. 5.000.000



4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKAR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
6. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	291.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	472.111.590
F. HARTA LAINNYA	Rp.	300.000.000
Sub Total	Rp.	7.943.811.590
III. HUTANG	Rp.	80.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.863.811.590

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.